Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tes Urine dalam Mengidentifikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di BNP Jawa Timur

Siti Nur Suciowati

nursuci_86@gmail.com | *Bayeman, Gondang Wetan,
Pasuruan, Indonesia*

Abstract: This paper is field research conducted at BNP East Java. This study aims to find: (1) conducting urine tests at BNP East Java and their significance, and (2) Islamic law's perspective on urine tests in identifying narcotics and psychotropic abuse. The results of the study concluded that: first, the urine test consists of three stages: firstly, a person must urinate and put in a container; secondly, the officer starts checking and finally determining the results. According to Islamic law, urine tests in identifying narcotics and psychotropic abuse are allowed on condition that all equipment must be washed and cleaned with water. The problem of proving the narcotics and psychotropic misuse is oriented towards the objectives of Islamic law without undermining the problem of urine that is unclean objects. The verification process is aimed to generate benefit by upholding justice so that a secure and peaceful society is formed. On the other hand, urine is one of the unclean objects and must be purified.

Keywords: Urine test, narcotics and psychotropic misuse, Islamic Law.

Abstrak: Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan di BNP Jawa Timur untuk mengetahui: (1) pelaksanaan tes urine di BNP Jawa Timur dan signifikasinya, dan (2) tinjauan hukum Islam terhadap tes urine dalam mengidentifikasi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, pelaksanaan tes urine terdiri dari tiga tahap yaitu seseorang harus kencing dan ditaruh dalam wadah, setelah itu petugas mulai memeriksa dan terakhir penentuan hasil. Kedua, menurut hukum Islam tes urine dalam mengidentifikasi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika diperbolehkan dengan syarat semua peralatan harus dicuci dan dibersihkan dengan air. Dengan adanya tujuan hukum Islam, dapat dikatakan bahwa masalah pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika lebih berorientasi pada tujuan hukum Islam tanpa meremehkan masalah urine yang termasuk benda

najis. Disatu sisi proses pembuktian tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umum yaitu dengan menegakkan keadilan sehingga terbentuk masyarakat yang aman dan tentram. Dan sisi yang lain urine merupakan salah satu benda najis dan harus disucikan.

Kata kunci: Tes urine, Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, BNP Jawa Timur, Hukum Pidana Islam

Pendahuluan

Dari waktu ke waktu kejahatan penyalahgunaan narkoba¹ terus mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada kenyataannya, kejahatan narkotika telah menjadi suatu kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisasi (*organized crime*).² Sebagai sebuah kejahatan, tentunya penyalahgunaan narkoba secara kriminologis telah menimbulkan kerugian masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.³

Ruang lingkup narkoba pun sedemikian luas, dapat dilihat dari kepanjangan narkoba itu sendiri yaitu narkotika dan obat-obatan berbahaya (yang dikenal dengan istilah psikotropika). Dalam hal ini, pengertian narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk bahan/obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjual belikan, diedarkan dan sebagainya di luar ketentuan hukum.⁴ Sebagaimana ketentuan hukum tersebut, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.⁵

¹ Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif

² Anggraeni Yuko Isnawangstri, Endbram Riaditya, dan Tuhu Setiawan, "Pengaruh Alat Bukti Hasil Tes Urin Melalui Pemeriksaan Laboratorium Forensik Terhadap Putusan yang Dijatuhkan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Gema XXVII*, no. 50 (Juli 2015): 1733.

³ Nafi' Mubarok, *Kriminologi dalam Perspektif Islam* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 4.

⁴ Pramono U. Thantawi, *Narkoba: Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam* (Jakarta: PBB-UIN dan Kas, 2003), 4.

⁵ Lihat pasal 4 Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 5 tentang Psikotropika

Di bidang kesehatan, narkotika dan psikotropika merupakan hal yang dilematis. Di satu sisi kedua barang ini diperlukan sebagai obat karena keampuhannya menghilangkan rasa nyeri dalam berbagai operasi, dan di sisi lain adanya keharusan menangani para korban yang ketagihan dan ketergantungan.⁶

Seiring dengan datangnya era global, para pengguna ini semakin meluas tanpa mengenal batasan umur, terutama pengedar masih mengintai generasi muda.⁷ Padahal itu bisa merusak mereka, sehingga bisa dikatakan bahwa narkoba telah merusak generasi bangsa.⁸ Tidak heran jika mana-mana muncul jargon yang mengajak masyarakat untuk menghindari dan mewaspadaai narkoba. “*Say no to drugs!*”⁹

Pemakaian narkoba pada umumnya berpengaruh pada kondisi fisik dan psikis si pemakai,¹⁰ meskipun sulit mengetahui gejala si pemakai pada masa awal pemakaiannya. Biasanya dapat diketahui setelah sampai pada tingkat kecanduan (*abuser, adiktif*). Dalam aktivitas sehari-hari si pemakai narkoba memang nampak seperti orang normal lainnya. Ini berbeda dengan seseorang meminum minuman keras, atau pemabuk.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat berpengaruh dalam penanggulangan dan pengungkapan kejahatan, yang biasa disebut *Scientific Crime Investigation*.¹¹ Begitu juga dengan proses identifikasi siapa-

⁶ Resah Anika Maria, “Sanksi Kumulatif dalam Penyalahgunaan Narkotika,” *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (Juni 2015): 167.

⁷ Ahmad Barjie B., *Pendekatan Islam dalam Upaya Penanggulangan Kriminalitas Narkotika di Kalangan Generasi Muda* (Jakarta: Departemen Agama, t.t.), 11.

⁸ Ivany Ningtyas Seily Rohmah, “Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (Juni 2017): 165.

⁹ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, trans. oleh Lala Hermawati Dharma (Bandung: Nuansa Cendikia, 2016), 18.

¹⁰ Maria, “Sanksi Kumulatif dalam Penyalahgunaan Narkotika,” 167.

¹¹ Yaitu proses penyidikan yang dalam system pembuktiannya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik. Lihat: Isnawangsri, Riaditya, dan Setiawan, “Pengaruh Alat Bukti Hasil

siapa saja yang memakai narkoba dan psikotropika. Hal ini mempermudah dan mempercepat terdeteksinya si pemakai. Yaitu dengan adanya tes urine, selain ada juga dengan tes darah. Diakui tes urine melalui alat pendeteksi ini merupakan jalan pintas bagi para penegak hukum, contohnya di BNP Jawa Timur. Kegiatan tes urin ini merupakan satu bentuk dari kegiatan deteksi dini penyalahgunaan narkoba, dengan tujuan mengetahui keberadaan narkoba dalam tubuh kemudian segera diberikan penanganan atau rehabilitasi sebelum jatuh sampai tahap candu.¹²

Meskipun begitu, dalam tes urine ini ada sesuatu yang mengganjal dalam Hukum Islam, yaitu penggunaan urine atau air kencing padahal termasuk benda najis. Sedangkan terdapat ketentuan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik, bahwa: "*Apabila Nabi SAW keluar untuk buang air maka saya membawakan air lalu bersuci dengannya*".¹³ Ini yang menunjukkan bahwa air kencing itu adalah najis, maka dari itu harus disucikan dan dibersihkan dengan menggunakan air.

Penyalahgunaan Narkoba Dan Cara Mengidentifikasinya Konsep Umum Narkotika dan Psikotropika

Batasan dan pengertian narkotika dan psikotropika

Napza (narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif) atau narkoba (singkatan dari narkotika dan obat berbahaya) adalah sama. Hanya saja "napza" biasa dipakai dalam bidang kedokteran sedang "narkoba" biasa dipakai oleh para penegak hukum. Kata narkotika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu "narkoticos" yang berarti membius, menghilangkan rasa, atau menyebabkan tak dapat berfikir/tak sadar.¹⁴

Tes Urin Melalui Pemeriksaan Laboratorium Forensik Terhadap Putusan yang Dijatuhkan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," 1733.

¹² Inassa, "Kegiatan Tes Urine Sebagai Upaya P4GN di Instansi Pemerintah oleh BNNP Jawa Timur (Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Surabaya)," 158-59.

¹³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan (Koleksi Hadis yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim)*, trans. oleh Muslich Shabir, Jilid 2 (Semarang: Al-Ridha, 1993), 179.

¹⁴ Zainul Bahri, *Kamus Umum* (Bandung: Angkasa, t.t.), 188.

Secara yuridis, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, bahwa "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya nyeri, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan".

Sementara itu, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bahwa "psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku".

Istilah narkotika dan psikotropika dalam Islam merupakan hal yang baru.¹⁵ Namun dengan adanya persamaan *'illat* (sebab) yaitu memabukkan, maka kedua obat ini disamakan dengan *khamr*. *Khamr* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.¹⁶

Islam bersikap tegas akan pengharaman *khamr*.¹⁷ Tidak dipersoalkan baik *khamr* tersebut dalam jumlah sedikit ataupun banyak, yang penting disini efek yang ditimbulkan yaitu memabukkan atau menghilangkan akal. Dengan efek tersebut secara tidak langsung dapat menjerumuskan

¹⁵ Rohmah, "Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam," 166.

¹⁶ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Husein Nabhan, Juz 9 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 46.

¹⁷ Minuman keras (*khamar*) adalah segala macam minuman yang memabukkan dan dapat menghilangkan kesadaran bagi peminumnya. Lihat: Setiawan Fu'adi, "Implementasi Perda Pamekasan tentang Larangan Miras dalam Prespektif Siyāsah Shar'iyah," *Jurnal Al-Qānūn* 18, no. 1 (Juni 2015): 87.

seseorang ke dalam kebinasaan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan, mengapa *khamr* wajib untuk di jauhi. Dengan demikian sesuatu minuman yang memabukkan berapapun jumlahnya baik sedikit maupun banyak adalah haram.¹⁸

Dasar hukum dan pengaturan narkotika dan psikotropika

Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, maka di Indonesia dikeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:¹⁹

1. Penggunaan narkotika dan psikotropika hanya boleh untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan.
2. Barang siapa menggunakan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain secara tidak sah harus dihukum jika tidak memiliki bukti bahwa penggunaannya untuk kepentingan pengobatan dan / atau ilmu pengetahuan.
3. Kegiatan produksi, peredaran, impor dan ekspor narkotika dan psikotropika berada di bawah pengawasan hukum.
4. Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap, narkotika dan psikotropika. Pemerintah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor.

Jenis-jenis narkotika dan psikotropika

Narkotika merupakan merupakan zat dapat membius, menghilangkan rasa, atau menyebabkan seseorang tak dapat berfikir/tak sadar diri. Sedangkan jenis-jenisnya berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dibagi menjadi tiga golongan yaitu:²⁰

¹⁸ Fu'adi, 88.

¹⁹ Tim Penyusun BNN, *Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati* (Jakarta: BNN, 2007), 167–69.

²⁰ Thantawi, *Narkotika: Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam*, 7–8.

1. Golongan I: narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya : heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain-lain.
2. Golongan II: narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan/ garam narkotika dalam golongan tersebut, dan lain-lain.
3. Golongan III: narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.

Sedangkan jenis-jenis narkotika yang sering disalahgunakan yaitu:²¹

1. Ganja

Efek samping penggunaannya antara lain denyut jantung semakin cepat, temperatur badan menurun, mata merah, nafsu makan bertambah, santai, tenang, dan melayang-layang.

2. Kokain

Efek samping penggunaannya antara lain antara lain biasanya tidak bergairah bekerja, tidak bisa tidur, halusinasi, tidak nafsu makan, berbuat dan berfikir tanpa tujuan, serta merasa gelisah dan cemas berlebihan.

3. Morfin dan heroin

Efek samping penggunaannya antara lain timbulnya rasa ngantuk, lesu, penampilan dungu jalan mengambang, rasa sakit seluruh badan, badan gemetar, jantung berdebar-debar, serta susah tidur dan nafsu makan kurang.

²¹ Thantawi, 4-6.

Psikotropika merupakan jenis obat berbahaya yang mampu menggerakkan dan mengaduk-aduk jiwa. Jenis-jenisnya berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah:²²

1. Golongan I: psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Misalnya adalah ekstasi, shabu-shabu, MDMA, LSD, STP, dan lain-lain.
2. Golongan II: psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Misalnya adalah amfetamin, fensiklidin, sekobarbital, metakualon, metilfenidat, ritalin dan lain-lain.
3. Golongan III: psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan, misalnya adalah pentobarbital, flunitrazepam, dan lain-lain.
4. Golongan IV: Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Misalnya adalah diazepam, klobozam, bromazepam, fenobarbital, klonazepam, nitrazepam seperti pil BK, DUM, dan MG.

Adapun jenis-jenis psikotropika yang sering disalahgunakan adalah:²³

1. Ekstasi

Efek samping penggunaannya antara lain biasanya timbul rasa gembira secara berlebihan, selalu merasa cemas, tubuh tidak mau diam (hiperaktif), dan rasa percaya diri meningkat.

2. Shabu

²² Thantawi, 8-9.

²³ Thantawi, 7-10.

Efek samping penggunaannya antara lain badannya lebih kuat dan energik (meningkatkan stamina), tidak mau diam (hiperaktif), rasa percaya diri meningkat, dan rasa ingin diperhatikan orang lain.

Sanksi pidana

Sanksi pidana terkait penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam Pasal 84 disebutkan: "Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

1. Menggunakan narkotika terhadap orang lain dan memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah).
2. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Sedangkan dalam Pasal 85 disebutkan: "Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

1. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
3. Menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Sedangkan sanksi pidana bagi penyalahgunaan psikotropika diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun

1997 tentang Psikotropika. Dalam Pasal 59 disebutkan: “Barang siapa:

1. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), atau
2. Memproduksi dan atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau
3. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) atau
4. Mengimpor psikotropika golongan I selain keperluan ilmu pengetahuan, atau
5. Secara tanpa milik, menyimpan, dan atau membawa psikotropika golongan I.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

1. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi; dipidana 0 dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Dengan ketentuan pidana yang begitu besar, dapat diharapkan para penyalahgunaan narkotika dan psikotropika akan berhenti dan takut selamanya akan pidana yang diberikan pemerintah. Inilah yang disebut dengan teori relative (teori tujuan), yaitu teori yang menyatakan bahwa pidana dijatuhkan dengan tujuan mencegah dan mengurangi kejahatan.²⁴ Karena pada dasarnya tujuan dari hukum adalah

²⁴ Nafi' Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), 38.

mewujudkan kedamaian sejati di dalam masyarakat, sehingga dapat terasa ketentraman dalam bathin setiap warga masyarakat.²⁵

Dalam Islam, sanksi pidana terhadap peminum *khamr* dimasukkan ke dalam perkara *ḥudūd*. Orang yang sudah meminum *khamr* haram hukumnya, ḥadnya adalah dicambuk (dipukul) 40 kali sampai 80 kali cambuk untuk membuatnya jera. Ini sebagaimana Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ra.,²⁶ dan Hadis riwayat Iman Muslim dari sahabat Ali ra.²⁷

Dua ukuran ḥad ini merupakan ḥad bagi peminum *khamr*. Selain itu dua ukuran tersebut telah ditetapkan berdasarkan keputusan Rasulullah saw. dan para sahabat.²⁸ Apabila ada hukuman yang selain dari dua ukuran tersebut, misalnya 50 kali atau 60 kali, maka tidak diperbolehkan secara mutlak.

Deskripsi Pelaksanaan Tes Urine di BNP Jatim dan Signifikansinya²⁹

BNP Jatim terbentuk pada tanggal 03 Desember 2004, dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/175/013/2004, yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan instansi terkait dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaannya di Bidang penyediaan,

²⁵ Arif Wijaya, "Hukum dan Kekuasaan dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Al-Qānūn* 12, no. 2 (Desember 2009): 318.

²⁶ Hadis Anas ra., dimana ia berkata bahwa Nabi saw. menerapkan hukuman cambuk terhadap orang yang meminum *khamr* (minuman keras) dengan pelepah kurma dan sandal. Dan Abu Bakar menerapkan hukuman cambuk itu sebanyak 40 kali. Lihat: Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan (Koleksi Hadis yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim)*, 449.

²⁷ Dalam riwayat Imam Muslim dari Ali. ra., dalam kisah (pencambukan) al Walid bin 'Uqbah, bahwa Nabi saw. mencambuk 40 kali, abu bakar mencambuk 40 kali, sedangkan Umar 80 kali. Semua itu merupakan sunnah dan yang (80 kali) ini lebih saya sukai. Dalam Hadis tersebut, bahwa seorang laki-laki disaksikan memuntahkan arak, maka Ustman ra. berkata: ia tidak akan muntah arak kalau belum meminumnya. Lihat: Ibnu Hajar al-Asqolani dan Moh. Ismail, *Bulughul Maram* (Surabaya: Al-Ma'arif, t.t.), 663.

²⁸ Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thoriqoh Izzah, 2002), 84.

²⁹ Soubar Isman (Sekretaris Umum), Wawancara, 28 April 2007.

pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Propinsi Jawa Timur.³⁰

Terkait tes urine, sampai pada tahun 2005, BNP Jatim masih melakukan sosialisasi lembaga ke masyarakat Jawa Timur. Tes urine sendiri dilaksanakan setelah adanya sosialisasi tersebut, sehingga dapat dikatakan tes urine di BNP Jawa Timur sudah berjalan sekitar tiga tahun.

Sasaran pelaksanaan tes urine di BNP Jatim yaitu untuk mengidentifikasi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di semua kalangan. Dengan demikian, pelaksanaan tes urine merupakan realisasi dari P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).³¹

Pelaksanaan tes urine ini memang membutuhkan waktu sekitar beberapa menit untuk menunggu hasilnya. Pelaksanaan tes urine melalui tahap sebagai berikut:

1. Seorang yang akan diperiksa harus kencing dulu dengan penjagaan dan pendampingan petugas dari BNP Jawa Timur. Kencing tersebut ditaruh dalam sebuah gelas untuk perempuan dan botol untuk laki-laki kemudian diberikan kepada petugas.
2. Petugas menyediakan alat tes dan pipet serta pemberian nama dan ID diatas alat tersebut. Setelah itu kencing diambil dari pipet dan diteteskan pada dua garis kanan dan kiri yang terletak dibawah alat tersebut yang masing-masing garis ditetesi 4 tetes kencing.
3. Untuk hasil yang dicapai harus menunggu 5 menit untuk memastikan tanda merah mengalir ke atas.

Adapun ketentuan dari BNP Jatim mengenai kriteria urine dalam mengidentifikasi masalah narkotika dan psikotropika hanya bertumpu pada alat tes yang digunakan, untuk lebih rincinya sebagai berikut:

1. Adanya tanda merah pada huruf OPI dan MET di sebelah kanan dan huruf AMP dan THC di sebelah kiri

³⁰ Inassa, "Kegiatan Tes Urine Sebagai Upaya P4GN di Instansi Pemerintah oleh BNNP Jawa Timur (Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Surabaya)," 151.

³¹ Inassa, 152.

menunjukkan orang tersebut positif atau menggunakan narkoba.

2. Adanya tanda merah pada huruf C baik sebelah kanan maupun sebelah kiri menunjukkan orang tersebut netral atau bersih dari narkoba. Adapula yang beraksi demikian, apabila seseorang tersebut netral maka muncullah tanda berwarna putih bukan merah.

Signifikasi pelaksanaan tes urine di BNP Jatim dalam mengidentifikasi penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika sudah terbukti dari pemeriksaan $\pm$ 400 orang dan hasilnya 100% negatif atau bersih dari obat-obat tersebut (bermerk MBO, DOA Multiplex). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi signifikasi pelaksana tes urine antara lain :

1. Standar alat tes
2. Waktu pemakaian narkoba pada alat tersebut
3. Penetralisir urine
4. Pemalsuan urine

Pengguna Narkotika dan Psikotropika dalam Prespektif Hukum Islam

Sebagaimana disebutkan di muka, narkotika dan psikotropika merupakan benda yang memabukkan dengan beragam jenis. Benda yang memabukkan dalam Islam disebut *khamr* yaitu sesuatu yang menghilangkan akal. Untuk itu, Islam melarang keras *khamr* karena tidak di ragukan lagi dapat melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi-potensi terutama akal.³²

Meminum *khamr* adalah perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ḥadd*. Sedangkan unsur-unsur pada jarimah minum *khamr* sehingga dapat dijatuhi hukuman, yaitu *al-shurb* (meminum) dan niat yang melawan hukum.³³

Meminum disini adalah minum minuman yang memabukkan baik sedikit maupun banyak, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam

³² Maria, "Sanksi Kumulatif dalam Penyalahgunaan Narkotika," 167.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 74-76.

Ahmad. Dan "minum" tersebut haruslah "sampai pada tenggorokan", meskipun minuman tersebut harus bercampur dengan makanan yang halal. Sedangkan "niat yang melawan hukum" artinya "peminum mengetahui dengan sadar bahwa yang diminum adalah *khamr*, dan itu hukumnya haram".

Dengan demikian menggunakan benda-benda yang memabukkan baik itu berupa *khamr* atau pun narkoba dan psikotropika adalah haram. Hal ini tampak dengan jelas bahwa Islam berupaya preventif dan antisipatif,³⁴ meskipun dalam kenyataannya belum memabukkan dan mendatangkan dampak negatif apa-apa. Namun dalam menentukan hukuman antara peminum *khamr* dan pengguna narkoba dan psikotropika ada dua pendapat, srbagai berikut:

1. Pendapat yang menyamakan pemberian hukuman antara peminum *khamr* dengan pengguna narkoba dan psikotropika.

Sebagaimana Abd. Al-Qadir Audah yang menyatakan: "Bahwa tindakan itu adalah perbuatan meminum dan yang diminum itu adalah sesuatu yang bernama *khamr*. Oleh karena pengertian *khamr* disini telah di perluas kepada segala sesuatu yang dapat mengganggu fungsi akal, maka perbuatan yang dilarang disini diperluas pula kepada segala tindakan yang menyampaikan *khamr* itu keadaan tubuh, baik dengan cara meminum atau dengan cara memakan atau menghisap melalui hidung atau dengan cara menyuntikkan."³⁵

Sehingga dengan memperluas perbuatan unsur meminum ini, akan berdampak pula pada hukuman antara kedua perbuatan tersebut dengan menyamakannya. Ini seperti pendapat Ibnu Taimiyah bahwa: "Sesungguhnya ganja itu haram hukumnya, terhadap peminumnya dikenakan hukuman seperti yang dikenakan terhadap peminum *khamr*. Ganja lebih jahat dari *khamr* ditilik dari segi merusakkan badan dan mengacaukan akal. Ia membuat seseorang menjadi lemah

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besara Fiqih Islam* (Jakarta: Kencana, 2003), 292.

³⁵ Syarifuddin, 293.

akal dan lemah keinginan dan keburukan-keburukan lainnya. Ia juga menghalangi orang dari mengingat Allah dan mendirikan sembahyang. Ganja ini termasuk ke dalam pengharaman *khamr* dan mabuk, secara *lafzīy* atau *ma'nawī*.”³⁶

Dengan demikian, hukuman yang berlaku bagi peminum *khamr* yaitu hukuman *ḥadd*, berlaku juga pada pengguna narkoba dan psikotropika. Sehubungan dengan tingginya bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba dan psikotropika, sehingga pantaslah jika hukuman penyalahgunaannya harus lebih tinggi daripada hukuman bagi peminum *khamr*. Ini seperti halnya hukuman bagi peminum *khamr*, dimana ketika dilakukan berulang kali atau sampai tiga kali maka dihukum cambuk. Juga, ketika diulangi sekali lagi atau kali keempat maka dilaksanakan pancung kepadanya. Ini berdasarkan Hadits riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Mu'awiyah ra.³⁷

2. Pendapat yang membedakan pemberian hukuman antara peminum *khamr* dengan pengguna narkoba dan psikotropika.

Pada unsur *jarīmah* minum *khamr* yang pertama disebutkan "adanya perbuatan yang berupa meminum". Di sini timbullah suatu masalah bahwa narkoba dan psikotropika merupakan bahan-bahan yang dikonsumsi "selain dengan cara meminum". Maka unsur meminum tidak terpenuhi, sehingga tidak dijatuhi dengan hukuman *ḥadd*, melainkan hukuman *ta'zīr*.³⁸

Dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan berkembang hukuman *ta'zīr* yang diberikan pada pengguna narkoba dan psikotropika cukup beralasan, dikarenakan bentuk-bentuk atau jenis-

³⁶ Sābiq, *Fikih Sunnah*, 63.

³⁷ Dari Mu'awiyah ra., dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda tentang perkara orang yang minum arak, apabila seseorang telah meminumnya, maka cambuklah dia, kemudian jika ia meminumnya lagi, cambuklah dia. Kemudian jika ia meminumnya lagi pada yang keempat, maka pancunglah (penggalah) lehernya" (HR. Ahmad). Lihat: al-Asqolani dan Ismail, *Bulughul Maram*, 664.

³⁸ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 75.

jenis kejahatan pun semakin hari juga semakin menjadi kompleks. Hal ini sebagai produk ijtihad para hakim dan para ahli hukum dalam merefleksikan kenyataan bahwa pemikiran hukum Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis mempunyai peluang untuk dikembangkan dan dijabarkan secara lebih leluasa.³⁹

Dengan demikian pemberian hukuman antara kedua perbuatan tersebut tidak sama meskipun benda-benda yang digunakan adalah haram. Hukuman yang diberikan bagi peminum *khamr* yaitu hukuman *ḥadd*, sedangkan bagi pengguna narkoba yaitu hukuman *ta'zīr*.

Tes Urine guna Identifikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dalam Prespektif Hukum Islam

Seperti halnya dengan *jarīmah khamr*, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika pun disamakan dalam hal cara pembuktian, baik itu dengan adanya saksi, dengan pengakuan maupun dengan *jarīmah*. Namun dengan adanya *jarīmah* inilah yang membedakan proses pembuktian kedua tindak pidana tersebut. Dengan banyaknya indikator pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dengan kecanggihan IPTEK pula para penegak hukum menemukan alternatif dalam mengidentifikasi tindak pidana ini yaitu dengan adanya tes urine.

Namun ada sesuatu yang mengganjal dalam tes urine ini, yaitu penggunaan urine (air kencing) sebagai obyek, yang dimana dalam hukum Islam merupakan benda najis. Najis dapat diartikan semacam kotoran atau sesuatu yang menjijikkan yang dapat menghalangi sahnya shalat bila melekat pada badan, kain atau tempat shalat dan wajib untuk mensucikannya. Sebagaimana *ijma'* *jumhur* ulama yang

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KHUP Nasional* (Bandung: Angkasa, 1996), 143-44.

mengatakan "tiada sah shalat, melainkan dalam keadaan suci."⁴⁰

Sehubungan dengan pelaksanaan tes urine di BNP Jawa timur, para petugas pelaksanaan tes bertindak secara hati-hati. Bukan hanya dalam Islam saja urine atau kencing dianggap sebagai kotoran atau sesuatu yang menjijikkan, namun secara nyata di masyarakatpun dianggap demikian. Untuk itu segala benda yang terkena najis urine haruslah disucikan. Baik itu peralatan yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan tes tersebut misalnya gelas, botol, pipet dan alat tes urine sendiri maupun anggota badan dan pakaian petugas BNP Jawa Timur, ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Mudaththir ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 222.⁴¹

Selanjutnya dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhary,⁴² bahwa Rasulullah saw. menjelaskan akan kenajisan air kencing (urine) manusia dan mewajibkan menjauhkan diri dari padanya. Berupa membersihkan diri dan menyatakan bahwa membasuh kencing itu, bukan perbuatan yang boleh dimudahkan. Tidak membasuhnya adalah suatu pekerjaan yang membawa kepada penderitaan

⁴⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqih Islam yang Berkembang dalam Kalangan Ahlus-Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 10.

⁴¹ Yang artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: 'Haid itu adalah kotoran'. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." Lihat: Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 63.

⁴² imana ia berkata, bahwa Nabi saw. berjalan melewati dua kubur, lantas beliau bersabda; sesungguhnya kedua orang itu sedang disiksa dan keduanya itu disiksa bukan karena dosa besar, salah seorang diantara keduanya itu tidak menyelesaikannya sampai tuntas sesuatu kencing, sedangkan yang lain maka ia suka kesana kemari mengadu domba, kemudian beliau mengambil dahan pohon yang masih basah dan membelahnya menjadi dua bagian, lalu beliau mengucapkannya pada masing-masing kubur itu, para sahabat bertanya; wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal itu? Beliau bersabda, "Semoga Allah SWT meringankan siksanya kedua orang itu selama dahan pohon itu belum kering." Riwayat Bukhari dan Muslim]. Lihat: Labib MZ, *Himpunan Hadits Pilihan Shahih Bukhari* (Surabaya: Dua Tiga, 1993), 189-90.

azab yang pedih.⁴³ Hal demikian ini menjelaskan bahwa najis yang berupa urine atau air kencing ini tidak boleh diabaikan dan wajib mensucikannya sampai tuntas. Meskipun cara mensucikannya sangat mudah dengan menggunakan air saja.

Melihat akan bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dapat menjerumuskan si pengguna ke dalam kebinasaan bahkan sampai berujung pada kematian, dapat diartikan begitu pentingnya proses pembuktian tindak pidana tersebut sebagai langkah preventif dan antisipatif. Namun alternatif yang diberikan oleh para penegak hukum dengan mempertimbangkan keefesienannya, maka tes urine inilah yang dipakai sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.⁴⁴ Apalagi, secara kriminologis "mencari penyebab kejahatan" adalah hal yang penting. Hal ini dikarenakan dengan bisa menemukan "penyebab kejahatan" maka semakin mudah untuk mengantisipasi kejahatan.⁴⁵

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT. Adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁶

Dengan uraian tujuan hukum Islam di atas, dapat dikatakan bahwa masalah pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika lebih berorientasi pada tujuan hukum Islam tanpa meremehkan

⁴³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, 1993), 66.

⁴⁴ Pada dasarnya alat bukti yang dihasilkan dari tes urin melalui pemeriksaan laboratorium forensik, dapat dikategorikan menjadi alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Lihat: Isnawangstri, Riaditya, dan Setiawan, "Pengaruh Alat Bukti Hasil Tes Urin Melalui Pemeriksaan Laboratorium Forensik Terhadap Putusan yang Dijatuhkan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," 1738.

⁴⁵ Mubarak, *Kriminologi dalam Prespektif Islam*, 6-7.

⁴⁶ Semua ketentuan hukum yang disyariatkan al-Kitab dan al-Sunnah pasti mengandung muatan maṣlaḥah hakiki, meskipun maṣlaḥah tersebut tidak nampak di hadapan orang-orang yang terbuai oleh hawa nafsu. Sebab maṣlaḥah yang dikehendaki Islam bukanlah hawa nafsu, tetapi maṣlaḥah hakiki yang umum dan tidak ditaksis. Lihat: Abdul Basith Junaidy, "Menimbang Maṣlaḥah sebagai Dasar Penetapan Hukum (Kajian terhadap Pemikiran Muhammad Abu Zahrah)," *Jurnal Al-Qānūn* 18, no. 2 (Desember 2015): 339.

masalah urine yang termasuk benda najis. Disatu sisi proses pembuktian tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umum yaitu dengan menegakkan keadilan sehingga terbentuk masyarakat yang aman dan tentram. Dan sisi yang lain urine merupakan salah satu benda najis dan harus disucikan.

Hal ini maka bisa melihat pada kaidah: "*al-maṣāliḥ al-āmmah muqaddamah 'alā al-maṣāliḥ al-khāṣṣah* (kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan-kepentingan pribadi)."⁴⁷

Dengan kata lain berdasarkan tujuan hukum Islam dan kaidah tersebut di atas, maka diperbolehkan pelaksanaan tes urine dalam mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dengan syarat setelah pelaksanaan tes tersebut, benda apa-apa saja yang terkena najis harus disucikan sampai tuntas.

Penutup

Pelaksanaan tes urine di BNP Jawa Timur merupakan realisasi dari P4GN berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2002 dan Sekep Gubernur Jatim. Dalam prespektif hukum Islam terkait dengan tes urin ini bisa dipaparkan sebagai berikut:

1. Bahwa urine adalah najis *mutawassitah* dan harus disucikan dengan air.
2. Bahwa apabila urine tersebut digunakan dalam mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba dan psikotropika maka diperbolehkan, dengan melihat kemaslahatan umum dan sisi pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dalam masyarakat yang harus didahulukan tanpa meremehkan kemaslahatan pribadi, yaitu urine yang termasuk benda najis.
3. Bahwa pembolehan ini disertai dengan syarat bahwa setelah pelaksanaan tes tersebut maka benda-benda apa saja yang terkena najis harus disucikan sampai tuntas.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), 10.

Daftar Pustaka

- Al Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thoriqoh Izzah, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.
- Ash-Shiddiqi, Muhammad Hasbi. *Hukum-hukum Fiqih Islam yang Berkembang dalam Kalangan Ahlus-Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- . *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, 1993.
- Asqolani, Ibnu Hajar al-, dan Moh. Ismail. *Bulughul Maram*. Surabaya: Al-Ma'arif, t.t.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KHUP Nasional*. Bandung: Angkasa, 1996.
- Bahri, Zainul. *Kamus Umum*. Bandung: Angkasa, t.t.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu' wal Marjan (Koleksi Hadis yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim)*. Diterjemahkan oleh Muslich Shabir. Jilid 2. Semarang: Al-Ridha, 1993.
- Barjie B., Ahmad. *Pendekatan Islam dalam Upaya Penanggulangan Kriminalitas Narkotika di Kalangan Generasi Muda*. Jakarta: Departemen Agama, t.t.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Fu'adi, Setiawan. "Implementasi Perda Pamekasan tentang Larangan Miras dalam Prespektif Siyāsah Shar'iyah." *Jurnal Al-Qānūn* 18, no. 1 (Juni 2015).
- Hakim, M. Arief. *Bahaya Narkotika Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*. Diterjemahkan oleh Lala Hermawati Dharma. Bandung: Nuansa Cendikia, 2016.
- Inassa, Ista. "Kegiatan Tes Urine Sebagai Upaya P4GN di Instansi Pemerintah oleh BNNP Jawa Timur (Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Surabaya)." *Medical Technology and Public Health Journal* 3, no. 2 (September 2019).
- Isnawangsri, Anggraeni Yuko, Endbram Riaditya, dan Tuhu Setiawan. "Pengaruh Alat Bukti Hasil Tes Urin Melalui Pemeriksaan Laboratorium Forensik Terhadap Putusan yang Dijatuhkan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Gema XXVII*, no. 50 (Juli 2015).

- Junaidy, Abdul Basith. "Menimbang Masalah sebagai Dasar Penetapan Hukum (Kajian terhadap Pemikiran Muhammad Abu Zahrah)." *Jurnal Al-Qānūn* 18, no. 2 (Desember 2015).
- Maria, Resah Anika. "Sanksi Kumulatif dalam Penyalahgunaan Narkotika." *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (Juni 2015).
- Mubarok, Nafi'. *Kriminologi dalam Prespektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- . *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- MZ, Labib. *Himpunan Hadits Pilihan Shahih Bukhari*. Surabaya: Dua Tiga, 1993.
- Rohmah, Ivany Ningtyas Seily. "Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (Juni 2017).
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh Husein Nabhan. Juz 9. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Soubar Isman (Sekretaris Umum). Wawancara, 28 April 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besara Fiqih Islam*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Thantawi, Pramono U. *Narkoba: Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam*. Jakarta: PBB-UIN dan Kas, 2003.
- Tim Penyusun BNN. *Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati*. Jakarta: BNN, 2007.
- Wijaya, Arif. "Hukum dan Kekuasaan dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Al-Qānūn* 12, no. 2 (Desember 2009).